



## PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA MULTIKULTURAL

**Fegiano Wulung Alami\***

SMA Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung

Jl. Raya Soreang - Banjaran No.KM 3, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40911

[fegianoalami57@guru.sma.belajar.id](mailto:fegianoalami57@guru.sma.belajar.id)

**Margi Wahono**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Negeri Semarang

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang

### **Abstrak**

**Tujuan:** *artikel ini membahas peran penting Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan multikultural bagi peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Multikulturalisme bukan sekadar pengakuan atas keberadaan keragaman, melainkan juga sebagai suatu konsep atau kebijakan politik untuk mengelola dan menangani keragaman budaya serta klaim-klaim moral, hukum, dan politis yang muncul karena loyalitas terhadap etnis, agama, bahasa, atau kebangsaan.*

**Metode:** *melalui pendekatan kualitatif, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi peran sekolah dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural pada peserta didik.*

**Hasil:** *hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang penting dalam mewujudkan warga negara multikultural. pembelajaran PPKn yang efektif dapat meningkatkan kesadaran multikultural dan pemahaman siswa tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat.*

**Kebaruan:** *pendekatan pembelajaran PPKn yang bermuatan pendidikan multikultural yang berpadu dengan pendekatan pembelajaran Project Based Learning menjadi kebaruan dalam penelitian ini.*

**Kata Kunci:** **pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Multikultural**

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dihadapkan pada tantangan dengan berbagai konflik sosial yang terjadi (seperti etnisitas, strata sosial, pengangguran, dan kriminalitas) yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Keberagaman yang terjadi di Indonesia sering kali memunculkan permasalahan-permasalahan yang bersumber dari adanya perbedaan suku bangsa, agama, dan antar golongan. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya

\*Penulis Koresponden

penanaman nilai-nilai yang menghargai segala bentuk perbedaan kepada para pelajar sebagai generasi muda sebagai wujud upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di Indonesia. Konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sinyal kuat yang harus dijadikan *early warning* bagi semua pihak khususnya pemerintah untuk mengambil tindakan preventif agar tidak berdampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wibowo & Wahono, 2017).

Keragaman yang terjadi sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan besar. Namun di lain pihak, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila seluruh elemen masyarakat tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman tersebut dengan baik. Umat Islam sebagai pemeluk agama yang mayoritas di Indonesia, harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen penting bagi warga negara Indonesia, perlu dioptimalkan semaksimal mungkin untuk mengelola dinamika keragaman yang ada agar dapat menjadi potensi kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Demokratisasi dan desentralisasi yang dibawa melalui Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Hasil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru menyatakan bahwa pendidikan harus menghasilkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, sehat, berilmu, cerdas, kreatif dan mandiri. Pernyataan tersebut menyoroti pergeseran dari pemerintahan otoriter ke kewarganegaraan partisipatif dan demokratis di mana 'identitas sipil tidak lagi dilihat sebagai integrasi kehendak warga negara dalam negara yang dipersonifikasikan (Hoon, 2015).

Sekolah, sebagai institusi pendidikan utama dan pusat pembelajaran resmi, memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai tempat di mana siswa datang untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan, sekolah memiliki potensi besar untuk menyematkan nilai-nilai multikultural. Hal ini tercermin dalam proses pembelajaran di dalam kelas, interaksi antara siswa dan guru, serta interaksi sosial mereka dengan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadikan sekolah sebagai sarana yang sangat berpotensi untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan multikultural kepada para siswa. Ketika para siswa menyelesaikan pendidikan formal mereka di sekolah menengah atas selama kurang lebih tiga tahun, mereka akan menjadi anggota aktif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Menghubungkan paradigma kewarganegaraan multikultural dengan peran sekolah sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam dan plural, karena diharapkan bahwa institusi sekolah dapat secara efektif berperan dalam rekayasa sosial dan transformasi sosiokultural bangsa. Pengalaman hidup di lingkungan sekolah, baik yang memiliki aspek positif maupun negatif, sudah menjadi hal yang umum. Ada banyak manfaat positif yang dapat diperoleh, salah satunya adalah pembentukan karakter para pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki moral yang baik. Dengan karakter yang kuat, diharapkan para pelajar sebagai warga negara muda dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dalam kehidupan masa depan.

Berdasarkan kenyataan yang memilukan ini, maka keberadaan sekolah dalam mengimplementasikan kewarganegaraan multikultural melalui pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis multikultural sangat diperlukan. Menurut Ainul Yaqin, pendidikan multikultural adalah pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua pembelajaran dengan cara menerapkan model dan metode pembelajaran yang bersumber pada pengembangan semua potensi pelajar untuk menghargai berbagai bentuk perbedaan dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari adanya keragaman budaya, agama, bahasa, gender, dan usia dengan tujuan melatih pelajar untuk dapat saling menghargai perbedaan yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung (Yaqin, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasari oleh adanya kemampuan pendekatan tersebut dalam memahami fenomena sebagaimana yang dialami oleh subyek, sehingga akan diperoleh suatu gambaran secara utuh mengenai bagaimana peranan sekolah dalam menerapkan kewarganegaraan multikultural. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang mampu mengungkap masalah-masalah sosial. Penelitian kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mengharuskan menemukan suatu makna sebagai hasil dari eksplorasi terhadap data, kemudian data yang terkumpul akan dianalisa secara detail dan mendalam dengan melibatkan beberapa informan atau obyek penelitian sebagai sumber data dalam penelitian ini (Creswell, 2016). Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Soreang Kabupaten Bandung.

Artikel ini merupakan bentuk dari hasil penelitian deskriptif analitis dengan cara menganalisis permasalahan disertai hasil analisis dari sumber-sumber pendukung yaitu artikel-artikel maupun dari buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal yang dituliskan dalam artikel ini. Analisis yang dibangun berdasarkan teori atau pengertian teoritis, bahwa model konseptual adalah sebuah konstruksi verbal atau visual yang membantu untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak (Jonker, Pennink, & Wahyuni, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang penting dalam mewujudkan warga negara multikultural. Pembelajaran PPKn memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang mendasari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta untuk menginternalisasi konsep-konsep multikulturalisme seperti toleransi, pluralisme, dan menghargai keberagaman budaya. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran PPKn dapat memberikan ruang bagi siswa untuk memahami perbedaan-perbedaan budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat, serta untuk belajar bagaimana bersikap inklusif dan menghargai keberagaman dalam interaksi sosial. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang menguatkan identitas sebagai warga negara multikultural.

Selanjutnya, penelitian menyoroti perlunya pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dan efektif dalam konteks multikultural, serta pelatihan yang kontinyu bagi guru PPKn untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar materi-materi yang berkaitan dengan multikulturalisme. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi siswa untuk menjadi warga negara multikultural yang berdaya.

Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang efektif dapat meningkatkan kesadaran multikultural dan pemahaman siswa tentang keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. pembelajaran PPKn memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang multikultural. Dengan kesiapan guru, dukungan kurikulum, dan kesadaran masyarakat yang meningkat, pendidikan multikultural melalui pembelajaran PPKn dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang beragam budaya, harmonis, dan inklusif.

Keanekaragaman budaya, sebagai atribut khas Indonesia sebagai negara bangsa, juga menjadi faktor pendorong bagi pengembangan dan penerapan model kebijakan masyarakat majemuk karena model tersebut diharapkan dapat menyatukan ragam keberagaman yang ada. Namun, karena unsur-unsur yang membentuk negara Indonesia sangat beragam baik dari segi geografis, fisik, populasi, sosial, ekonomi, maupun budaya, maka model kebijakan pluralistik

pada saat itu dianggap sebagai pendekatan yang paling rasional dan dapat memenuhi kebutuhan sebagai pengikat kesatuan nasional yang terpadu (Agustianty, 2021). Untuk mengembangkan pemahaman tentang keberagaman yang ada di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerapkannya melalui dunia pendidikan. Pendidikan multikultural telah diterapkan pada pembelajaran di persekolahan. Pendidikan multikulturalisme di Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang dan melalui berbagai tahapan. Kehadirannya tidak terbatas pada ruang kosong, tetapi telah meresap ke dalam masyarakat seiring dengan perubahan struktur sosial dan politik yang terjadi (Nurchayono, 2018).

Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural tercermin dari banyaknya insiden dan pertikaian, serta kurangnya pemahaman akan pluralisme di Indonesia. Kesadaran akan sikap yang bijaksana juga masih belum mencolok pada setiap individu Indonesia. Semua warga seharusnya telah teredukasi dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Nilai-nilai tersebut diterapkan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Fenomena perpecahan masih sering terjadi, seperti yang sering disorot di media massa, serangan terhadap gereja, konflik di perbatasan, dan banyak lagi insiden yang hanya diredam tanpa penyelesaian yang menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci untuk memberikan pemahaman sejak dini, dengan harapan ke depannya tidak akan ada konflik serupa dan Indonesia dapat menjauh dari perpecahan. Toleransi yang tinggi, pengembangan budaya yang dimiliki, serta penghargaan dan pelestarian budaya-budaya Indonesia harus dijunjung tinggi (Wika dan Harmawati, 2021).

Guna mengamati proses pelaksanaan praktik kewarganegaraan multikultural di lingkungan sekolah melalui pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Pengenalan Konsep Multikultural:** Guru PPKn memperkenalkan konsep-konsep multikultural kepada siswa, seperti toleransi, pluralisme, menghargai keberagaman, dan hak asasi manusia.
2. **Diskusi dan Refleksi:** Guru memfasilitasi diskusi kelas tentang pentingnya multikulturalisme dalam masyarakat modern. Siswa diundang untuk berbagi pengalaman mereka sendiri dan berdiskusi tentang tantangan dan manfaat dari hidup dalam masyarakat multikultural.
3. **Studi Kasus:** Guru menggunakan studi kasus tentang konflik antarbudaya atau pelanggaran hak asasi manusia sebagai contoh konkret tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat.
4. **Analisis Media:** Siswa menganalisis media, termasuk iklan, film, dan berita, untuk mengidentifikasi stereotip atau prasangka yang mungkin ada dalam representasi budaya dan etnis. Mereka kemudian membahas bagaimana representasi tersebut dapat memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberagaman.
5. **Pembelajaran Kolaboratif:** Guru mendorong pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengeksplorasi isu-isu multikultural dan menciptakan solusi yang mempromosikan integrasi sosial dan penghormatan terhadap perbedaan.
6. **Kegiatan Praktik:** Guru mengorganisir kegiatan praktik di mana siswa berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti kunjungan ke tempat ibadah, pertemuan dengan anggota komunitas etnis, atau partisipasi dalam acara budaya.
7. **Evaluasi dan Refleksi:** Siswa dievaluasi tidak hanya berdasarkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep multikultural, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga merenungkan bagaimana pengalaman pembelajaran tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka sendiri terhadap keberagaman.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada multikulturalisme mengadopsi pendekatan dialogis sebagai cara untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Prinsip dasar dari pendidikan ini adalah semangat kesetaraan, kesederajatan, saling memahami, menghargai persamaan, perbedaan, keunikan, serta interdependensi, serta adanya kepercayaan antarpihak yang terlibat di dalamnya (Muchasan, 2018). Bagi guru yang berada di tengah masyarakat yang semakin beragam, tantangannya adalah bagaimana menyiapkan siswa mereka agar dapat berpartisipasi dalam isu-isu kompleks dengan cara yang mencerminkan prinsip pemerataan dan keadilan. Demokrasi dan keragaman merupakan konsep yang kompleks yang tidak dapat dipahami secara sempit; konflik dalam pengalaman, sudut pandang, sejarah, dan kepentingan tertentu tidak dapat diurai menjadi formula atau narasi standar, dan penyelesaiannya tidak dapat direduksi menjadi langkah-langkah yang baku. Kebanyakan guru memerlukan bantuan dalam belajar untuk menganalisis dan membimbing siswa melalui tantangan-tantangan kehidupan publik yang kompleks, dan tidak realistis untuk mengharapkan mereka untuk menemukan cara melakukannya sendiri (Sleeter, 2014).

Pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia dengan orang-orang di seluruh dunia. Identitas global, keterikatan, dan komitmen merupakan kosmopolitanisme (Nussbaum, 2017). Kosmopolitan memandang diri mereka sebagai warga dunia yang akan membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk kepentingan global yang akan menguntungkan umat manusia. Nussbaum menyatakan bahwa 'kesetiaan mereka adalah untuk komunitas manusia sedunia'. Pendidikan kewarganegaraan juga harus membantu siswa untuk menyadari bahwa 'tidak ada loyalitas lokal yang dapat membenarkan lupa bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab satu sama lain' (Appiah, 2019). Sebagai warga masyarakat global, siswa juga harus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang perlunya mengambil tindakan dan membuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah dunia yang sulit. Mereka perlu berpartisipasi dengan cara yang akan meningkatkan demokrasi dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial dalam komunitas budaya, bangsa, wilayah, dan dunia mereka. Wacana pendidikan multikultural di Indonesia yang berakar pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak dapat dipisahkan dari gelombang reformasi pendidikan secara global. Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak dapat mengabaikan pengaruh yang lebih luas dari dunia, sehingga pendidikan multikultural memainkan peran yang signifikan dalam mempersiapkan generasi bangsa sebagai bagian dari warga negara global. Globalisasi telah mengubah keterkaitan antara bangsa-bangsa menjadi sebuah komunitas global (Adhani, 2014).

Kurikulum di sekolah yang bersumber pada wawasan multikultural memang tidak mudah disusun. Suparta (Suparta, 2008) menjelaskan terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya menyusun kurikulum yang multikultural di lingkungan sekolah, yaitu:

1. Kebudayaan lokal di Indonesia ratusan jumlahnya, maka dari semua puncak-puncak kebudayaan daerah itu harus dipilih beberapa saja yang relevan dan sedikit banyaknya lengkap inventarisasinya.
2. Sejalan dengan otonomi dalam bidang pendidikan, maka sebaiknya pilihan mana yang relevan untuk dimasukkan kedalam mata pelajaran yang bersangkutan, harus diserahkan kepada daerah-daerah otonom untuk merundingkannya sendiri.

Keberhasilan sekolah dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural melalui pendidikan multikultural, selain ditentukan oleh kurikulum, model penanaman kewarganegaraan multikultural di sekolah Peran guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam menimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah sangatlah penting, Guru PPKn dapat mengajar dan mempromosikan nilai-nilai multikultural, seperti toleransi, kerjasama antarbudaya, menghargai keberagaman, dan menghormati hak asasi manusia. Mereka dapat menggunakan berbagai metode pengajaran, termasuk cerita, diskusi, permainan peran, dan proyek kolaboratif untuk menyampaikan pesan multikultural. Guru PPKn dapat bekerja sama dengan guru-guru

mata pelajaran lain untuk mengintegrasikan konten multikultural ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan bahan bacaan, film, atau proyek-proyek yang mengangkat tema-tema multikultural ke dalam pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Guru PPKn dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di kelas, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau etnis mereka. Ini dapat mencakup menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka sendiri serta menghargai keberagaman dalam diskusi kelas. Guru PPKn dapat menjadi contoh bagi siswa dengan menunjukkan sikap dan perilaku multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menunjukkan toleransi, menghormati keberagaman, dan mengambil sikap terhadap diskriminasi atau intoleransi di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran berbasis proyek (PjBL) Guru PPKn dapat mendukung penelitian dan proyek yang mengangkat tema-tema multikultural di sekolah. Mereka dapat membimbing siswa dalam mengeksplorasi isu-isu multikultural melalui proyek-proyek penelitian, drama, seni, atau media lainnya.

Pendekatan pluralis menegaskan dan mendorong multikulturalisme, baik pada ranah privat maupun pada ranah publik bereaksi terhadap kritik netralitas liberal, negara pluralis akan terang-terangan mengadopsi kebijakan ini guna mendorong perkembangan kelompok tertentu, mengakui mereka sebagai kelompok yang sah, dan membentuk perkembangan komunitas politik di sekitar mereka. Budaya minoritas akan bebas untuk berasimilasi secara maksimal, sebagian atau tidak sama sekali, bergantung pada bagaiman hubungan mereka sendiri dengan kelompok budaya yang "dominan". Namun, yang terpenting dari hal itu adalah bahwa mereka dapat diakui telah memiliki hak dan status yang sama. Cara yang tepat untuk melakukan atau mempraktekan kewarganegaraan multikultural adalah dengan menjelaskan kebalikannya yang dikritik atau dimodifikasi. Kewarganegaraan universal mengacu pada kesetaraan hak dan status yang telah muncul untuk mendefinisikan keanggotaan di negara-bangsa liberal demokratis: "kewarganegaraan adalah untuk semua orang, dan setiap orang memiliki kesamaan hak sebagai seorang warga negara" (Young, 2002). Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan adanya keanekaragaman itu, akan tetapi sebagai suatu gagasan atau kebijakan politik untuk mengatasi dan menangani keanekaragaman budaya dan klaim-klaim moral, hukum, dan politis yang dibuat atas nama kesetiaan pada etnik, agama, bahasa, atau kebangsaan (Kymlicka, 2022).

## SIMPULAN

Sebagai bagian yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah memiliki perana yang penting dalam mewujudkan warga negara yang memahami kondisi bangsa yang memiliki keberagaman sangat komoleks, sehingga nantinya mamou menjadi warga negara yang memahami dan melaksanakan nilai-nilai multikultural dengan baik. Sebagai konsekwensinya, sekolah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu mewujudkan hal tersebut melalui pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai multikultural kepada para peserta didik. Penerapan Pendidikan multikultural melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara multikultural. Tanpa adanya pendidikan multikultural yang dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah sulit bagi peserta didik untuk memahami dan melaksanakan pendidikan multikultural yang tujuannya adalah membentuk *smart and good citizens*. Dengan demikian dapat disimpulkan implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan kewarganegaraan multikultural yang baik bagi bangsa Indonesia.

Pembelajaran PPKn dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan pemahaman, apresiasi, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan etnis dalam masyarakat, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam dunia yang semakin multikultural.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhani, Y. (2014). Konsep pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pencegahan konflik. *Sosio Didaktika*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1211>
- Agustianty, E. F. (2021). *MULTIKULTURALISME DI INDONESIA*. 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/tejgv>
- Appiah. (2019). The importance of elsewhere. *Foreign Affairs*, 2, 20–26. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/26798082>
- Creswell, J. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4 ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Hoon, C. (2015). *of Southeast Asian Studies : Multicultural citizenship education in Indonesia : The case of a Chinese Christian school*. (2013), 490–510. <https://doi.org/10.1017/S0022463413000349>
- James A. Banks. (2017). *Failed Citizenship and Transformative Civic Education*.
- Jonker, J., Pennink, B. J. W., & Wahyuni, S. (2011). *Metodologi Penelitian: Panduan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kymlicka, W. (2022). *Assessing Multiculturalism in Global Comparative Perspective* (1st ed.; A. T. Yasmeen Abu-Laban, Alain-G Gagnon, ed.). New York: Routledge.
- Muchasan, A. (2018). Pendidikan islam multikultural di pesantren (Kasus, Studi Pondok, Pada Sirojul, Pesantren Semanding, Ulum Kediri, Pare). *Inovatif*, 4(1), 77–99.
- Nurchayono, H. (2018). Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, 2(1), 105–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>
- Nussbaum, M. (2017). *THE EVOLUTION OF LIBERAL* (1 ed.; P. M. and D. Araya, ed.). Ney York: Routledge.
- Osler, Audrey; Starkey, H. (2010). *Teachers and Human Rights Education*. London: Trentham Books Ltd.
- Sleeter, C. E. (2014). Multiculturalism and education for citizenship in a context of neoliberalism. *Intercultural Education*, 25(2), 85–94. <https://doi.org/10.1080/14675986.2014.886357>
- Suparta, M. (2008). *Islamic multicultural education: sebuah refleksi atas pendidikan agama Islam di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Al-Ghazali Center.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>
- Wika, A., Harmawati, Y., & Pd, M. (2021). *Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural*. 9(1), 51–57.
- Yaqin, M. A. (2019). *Pendidikan Multikuktural: cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan* (A. Halim, ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Young, I. M. (2002). Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship. In J. P. Derek Matravers (Ed.), *Debates in Contemporary Political Philosophy* (1st ed.). London: Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203986820>